



Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

---

# PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

---

Materi Pelatihan Bagi Peserta Diklat "Pengelolaan Keuangan Daerah"  
Edisi Tahun 2014

Materi Pelatihan  
**BAB II**  
**PENDAPATAN  
DAERAH**  
DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
Edisi Tahun 2014



## KATA SAMBUTAN

Kapasitas sumber daya manusia yang andal di seluruh pemerintah daerah merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) -Kementerian Keuangan sejak tahun 1981/1982 telah menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah (KKD).



Sementara itu, kegiatan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK) diselenggarakan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, KKD dan KKDK dikerjasamakan dengan 7 perguruan tinggi negeri (selanjutnya dikenal dengan sebutan *center of excellences*), yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas (Unand), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Pelaksanaan KKD-KKDK terus mengalami penyempurnaan dan *updating* terutama terkait dengan kurikulum, satuan acara pembelajaran (SAP), dan modul. Pada tahun 2012, modul-modul kegiatan KKD-KKDK diseragamkan agar setiap lulusan mempunyai pemahaman yang sama atas materi yang diajarkan. Seiring dengan adanya transformasi kelembagaan DJPK dimana salah satu pilarnya adalah transformasi KKD/KKDK, maka perbaikan kualitas pelaksanaan KKD-KKDK terus dilanjutkan dan pada tahun 2014, DJPK mendapat dukungan dari *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation* (AIPD) untuk melakukan updating modul sekaligus menyesuaikannya menjadi modul terintegrasi yang nantinya akan dilakukan penjenjangan dari tingkat dasar (*basic*), menengah (*intermediate*), lanjutan (*advance*) dan *executive*. Hal tersebut dimaksudkan agar aparatur pengelola keuangan daerah dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.

Dalam tahun 2015, akan diselenggarakan *In-House Training* (*Levelling end user training*) bekerjasama dengan 34 Badiklat Provinsi. Dalam rangka menunjang *In-House Training* tersebut, DJPK akan menyelenggarakan ToT Master Trainer dan ToT Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar baik di internal Kemenkeu maupun melibatkan wakil dari PTN yang tersebar di 34 provinsi.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation* (AIPD) dan mitra pelaksana AIPD yang telah mendukung pelaksanaan standardisasi materi pelatihan pengelolaan keuangan daerah ini. Kami berharap output dari modul integrasi ini akan memudahkan peserta dalam memahami pengelolaan keuangan daerah sehingga akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah ke depan. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun modul, pimpinan dan pengurus center penyelenggara kegiatan diklat pengelolaan keuangan daerah serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan standardisasi materi pelatihan pengelolaan keuangan daerah ini.

Diharapkan dengan kehadiran modul yang telah distandardisasi ini akan meningkatkan kualitas pemahaman seluruh stakeholder khususnya yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan daerah. Ke depan, modul terintegrasi ini dapat terus diupdate dan terjaga kualitasnya dengan baik serta juga memudahkan para pelatih dan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan daerah dapat berkontribusi pada perwujudan tatalaksana pemerintahan yang baik, sehingga menghasilkan kebijakan dan layanan publik yang berkualitas tinggi.

Jakarta, November 2014  
**Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan**

**Dr. Boediarsa Teguh Widodo, M.E**  
NIP. 19580823 198210 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Sambutan	ii
Halaman Sub Judul	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
PENDAHULUAN	
A. Abstraksi	1
B. Latar Belakang	2
C. Tujuan Instruksional Umum	3
D. Metode Pembelajaran	4
TOPIK 1 HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH	5
1.1 Hubungan Kewenangan Antar Tingkat Pemerintahan	7
1.2 Hubungan Keuangan antar Tingkat Pemerintahan	12
1.3 APBN DAN APBD	16
1.4 Dana Dekonstrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Urusan Bersama	21
1.5 Soal Latihan	26
TOPIK 2 PENGANTAR PENDAPATAN DAERAH	27
1.1 Pengertian Pendapatan Daerah	29
1.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30
1.3 Sumber-Sumber PAD	31
1.4 Dasar Hukum PAD	34
1.5 Pengertian Dana Perimbangan	34
1.6 Pengertian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	35
1.7 Soal Latihan	35
TOPIK 3 PENGANTAR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	36
1.1 Arti Penting PAD dalam Perekonomian Daerah	36
1.2 Masalah Penetapan Retribusi Daerah	40
1.3 Soal Latihan	41
TOPIK 4 PAJAK DAERAH	41
1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah	43
1.2 Prinsip-Prinsip Pajak Daerah	45
1.3 Kriteria Pajak Daerah	46
1.4 Kriteria Memilih Pajak Daerah	47
1.5 Jenis-Jenis Pajak Daerah	49

1.6	Masalah-Masalah dalam Penerapan Pajak Daerah	51
1.7	Isu-Isu Terkini Pajak Daerah	54
1.8	Soal Latihan	57
<b>TOPIK 5</b>	<b>PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERSEDAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)</b>	59
1.1	Latar Belakang	61
1.2	PBB-P2 Sebagai Pajak Pusat	62
1.3	PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah	66
1.4	Fungsi dan Pelaksanaan PBB-P2	66
1.5	Langkah-Langkah Optimalisasi PBB-P2	67
1.6	Masalah-Masalah dalam Pemungutan PBB-P2	69
1.7	Soal Latihan	69
<b>TOPIK 6</b>	<b>TEKNIK PELAKSANAAN PBB-P2</b>	70
1.1	Objek PBB	72
1.2	Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2	76
1.3	Pembayaran PBB-P2	76
1.4	Pengurangan PBB-P2	81
1.5	Soal Latihan	84
<b>TOPIK 7</b>	<b>ANALISIS STANDAR BELANJA</b>	85
1.1	Subjek, Wajib Pajak & DASAR PENGENAAN BPHTB	87
1.2	Tarif BPHTB dan Perhitungan Pajak Terhutang	88
1.3	Tarif BPHTB dan Perhitungan Pajak Terhutang	89
1.4	Saat Terutang BPHTB	91
1.5	Pengurangan	92
1.6	Pemungutan BPHTB	96
1.7	Pelaporan PPAT/Notaris dan Instansi Lain Yang Membidani Pelayan Lelang Negara dan Pertahanan	98
1.8	Sanksi & Denda	99
1.9	Soal Latihan	99
<b>TOPIK 8</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	100
1.1	Pengertian dan Fungsi Retribusi Daerah	102
1.2	Jenis-Jenis Retribusi Daerah	102
1.3	Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah	107
1.4	Masalah-Masalah dalam Penerapan Retribusi Daerah	111
1.5	Soal Latihan	111
<b>TOPIK 9</b>	<b>PROYEKSI POTENSI DAN PENENTUAN TARIF PAJAK DAERAH</b>	112

1.1	Menaksir Pertumbuhan dengan Teknik Ekstrapolasi	119
1.2	Teori dan Latihan Menghitung Potensi Pajak Daerah	114
1.3	Soal Latihan	128
<b>TOPIK 10</b>	<b>PROYEKSI POTENSI DAN PENENTUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH</b>	129
1.1	Teori dan Latihan Menghitung Potensi Retribusi Daerah	131
1.2	Soal Latihan	140
<b>TOPIK 11</b>	<b>PROYEKSI POTENSI DAN PENENTUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH</b>	141
1.1	Pendahuluan	143
1.2	Pengertian Tarif	144
1.3	Pengertian Biaya	145
1.4	Pengelolaan Persampahan	146
1.5	Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi	148
1.6	Contoh Kasus Penetapan tarif Retribusi Sampah di Kota Indah Bersina	149
1.7	Tarif Retribusi Sampah di Kota Indah Berseri	150
1.8	Gambaran Umum Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kota Indah Bersinar	153
1.9	Metode BEP dalam menghitung Besarnya Pengenaan tarif Retribusi	152
1.10	Soal Latihan	164
<b>TOPIK 12</b>	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DAN LPADS</b>	164
1.1	Konsep dasar LPADS	166
1.2	Jenis dan Sumber LPADS	167
1.3	Dasar hukum LPADS	172
1.4	Optimalisasi LPADS	172
1.5	Isu-Isu Terkini tentang LPADS	172
1.6	Soal Latihan	172
<b>TOPIK 13</b>	<b>SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH</b>	173
1.1	Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah	175
1.2	Maksud dan Tujuan	175
1.3	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah	176
1.4	Soal Latihan	198
<b>TOPIK 14</b>	<b>PROSES PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH TENTANG PDRD</b>	200
1.1	Proses Penyusunan Peraturan daerah PDRD	201
1.2	Pengawasan Penyusunan Peraturan Daerah PDRD	204

1.3	Pembatalan Perda dan Sanksi	205
1.4	Soal Latihan	206
<b>TOPIK 15</b>	<b>STUDI KASUS OPTIMALISASI PAD</b>	207
1.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	209
1.2	Penutup	228
1.3	Analisis	229
1.4	Soal Latihan	230
<b>TOPIK 16</b>	<b>KONSEP, PERANAN, DAN KEBIJAKAN DANA TRANSFER KE DAERAH</b>	232
1.1	Konsep dan Peranan Dana Transfer di Indonesia	234
1.2	Jenis-Jenis Dana Transfer di Indonesia	236
1.3	Tujuan Dana Transfer	237
1.4	Soal Latihan	237
<b>TOPIK 17</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>	238
1.1	Pengertian dan Dasar Hukum Dana Bagi Hasil	240
1.2	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan	241
1.3	Bagi Hasil Pajak Penghasilan	244
1.4	Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT)	245
1.5	Soal Latihan	246
<b>TOPIK 18</b>	<b>BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM</b>	247
1.1	Pengertian dan Filosofi DBH SDA	249
1.2	Dasar Hukum dan Dasar Perhitungan DBH SDA	250
1.3	Formula Alokasi DBH SDA	252
1.4	Penetapan Alokasi DBH SDA	264
1.5	Penyaluran DBH SDA	265
1.6	Soal Latihan	266
<b>TOPIK 19</b>	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	267
1.1	Konsep Dasar, Tujuan dan Fungsi DAU	269
1.2	Formula DAU (Alokasi Dasar dan Fiscal Gap)	271
1.3	Analisis Peranan DAU dan Pemerataan Fiskal Antar daerah	262
1.4	Analisis Ketergantungan Pendapatan Daerah terhadap DAU	277
1.5	Permasalahan DAU dan Insentif Pemekaran	279
1.6	Isu-Isu Berkaitan dengan DAU (Perubahan Formula, Daerah dengan DAU Nol atau Minus, Luas Wilayah Laut dan lain lain)	280
1.7	Soal Latihan	281
<b>Tabel 20</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	282

1.1	Konsep Dasar, Tujuan, dan Fungsi DAK	284
1.2	Kriteria DAK	288
1.3	Mekanisme Penyaluran DAK	296
1.4	Isu-Isu tentang DAK	299
1.5	Soal Latihan	301
<b>Tabel 21</b>	<b>DANA TRANSFER LAINNYA</b>	302
1.1	Konsep dan Fungsi	304
1.2	Isu-Isu Terbaru tentang Dana Transfer Lainnya	311
1.3	Soal Latihan	346
<b>Tabel 22</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	312
1.1	Konsep, Jenis, dan Sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	314
1.2	Bagi Hasil Pajak Provinsi	314
1.3	Pendapatan Hibah	315
1.4	Dana Otonomi Khusus Dana BOS	318
1.5	Dana darurat	320
1.6	Dasar Hukum, Optimalisasi, dan Isu Terkini Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	324
1.7	Soal Latihan	324
<b>Tabel 23</b>	<b>SISTEM DAN PROSEDUR DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	326
1.1	Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah	328
1.2	Sisdur dan Penatausahaan	328
1.3	Soal Latihan	346
<b>Tabel 24</b>	<b>STUDI KASUS PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	347
1.1	Upaya Meningkatkan PAD Melalui Sektor Wisata di Kabupaten Kuningan	349
1.2	Soal Latihan	361
1.3	REFERENSI	361
<b>LAMPIRAN</b>		364

## PENDAHULUAN

### A. Abstraksi

Secara keseluruhan, modul ini membahas mengenai konsep, struktur, dan aspek teknis pendapatan daerah, serta kaitannya terhadap perekonomian daerah pada umumnya. Modul ini terdiri dari 8 Bab yang kemudian terbagi kepada 21 topik. Pada setiap topik terdapat pedoman untuk mempelajari topik. Pada bagian akhir masing-masing topik terdapat soal-soal latihan yang ditujukan untuk mengetahui tingkat penyerapan dan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan, sebagai feedback untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya.

Modul dimulai dengan pendahuluan pada bab pertama. Bab ini berisikan abstraksi, latar belakang, tujuan instruksional umum, serta metode pembelajaran yang diterapkan dalam pelatihan, yang dimaksudkan sebagai pengantar menuju pembelajaran materi modul selengkapnya. Bab kedua, membahas secara ringkas hubungan antara pusat dan daerah, meliputi hubungan kewenangan antar tingkat pemerintah, hubungan keuangan antar tingkat pemerintah, struktur dan hubungan antara APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana urusan bersama. Bab kedua adalah topik yang berdiri sendiri.

Pengertian-pengertian dasar berkaitan dengan pendapatan daerah, dibahas dalam bab ketiga, sebagai bekal untuk memahami dengan lebih baik materi pelatihan pada bab-bab selanjutnya. Pembahasan mencakup pengertian tentang pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Seperti halnya bab 2, bab 3 ini adalah topik yang berdiri sendiri.

Proposi terbesar materi dalam modul ini adalah tentang pendapatan asli daerah (PAD), yang dibahas dalam bab keempat. Bab ini dimulai dengan pengantar dan isu terkini tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pokok-pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta sistem dan prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan PBB-P2 dijadikan pokok bahasan tersendiri oleh karena dalam prakteknya masih banyak daerah yang belum optimal melaksanakannya. Pembahasan diakhiri dengan studi kasus proses penyusunan peraturan daerah tentang PDRD dan studi kasus optimalisasi PAD. Bab ini terdiri dari 12 topik

Bab kelima, membahas tentang dana transfer. Bab ini dimulai dengan topik konsep, serta peranan dan kebijakan dana transfer ke daerah, lalu dilanjutkan dengan topik bagi hasil pajak pusat, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), serta dana transfer lainnya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (LPDS), merupakan pokok bahasan dalam bab keenam modul ini. Pokok bahasan tersebut mencakup konsep dasar jenis, sumber, dasar hukum, dan optimalisasi LPDS, bagi hasil pajak provinsi, hibah, dan isu-isu terkini tentang LPDS.

Selanjutnya, untuk melengkapi pemahaman tentang aspek teknis berkaitan dengan pendapatan daerah, dalam bab ketujuh modul ini dibahas tentang sistem dan prosedur serta penatausahaan pendapatan daerah sebagai sebuah bunga rampai. Bab terakhir, yaitu bab kedelapan, membahas studi kasus pendapatan daerah. Setelah pengantar, materi dilanjutkan dengan contoh kasus pendapatan daerah, dan diakhiri dengan diskusi solusi permasalahan optimalisasi pendapatan daerah.

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini dapat terselesaikan. Modul ini digunakan didalam Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kompetensi peserta di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan didalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Proses perencanaan dan penganggaran pada prakteknya melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan. Peran serta masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menampung berbagai masukan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Proses perencanaan tersebut dituangkan dalam UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri 54/2010.

Tindak lanjut fase perencanaan adalah proses penganggaran yang melibatkan banyak pihak baik DPRD maupun SKPD. Berbagai usulan program dan kegiatan perlu ditampung dan disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan. Proses koordinasi dan sinkronisasi diatur dalam PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 jo Permendagri 21/2011. Terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sedikit banyak telah mewarnai modul perencanaan dan penganggaran daerah ini.

Kami menyadari bahwa modul ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dalam penyempurnaan modul ini sehingga bisa menjadi acuan semua pihak terutama aparatur pemerintah daerah.

Akhir kata, kami sangat berharap modul ini dapat bermanfaat terutama bagi peserta diklat guna meningkatkan kompetensinya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang turut mendukung dan memberikan saran dan arahan di dalam penyusunan modul ini.

**Jakarta, November 2014**

**Tim Penulis**

## **Supported by:**



Australian Government  
Department of Foreign Affairs and Trade

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP  
FOR DECENTRALISATION (AIPD)

Australian  
A red kangaroo icon next to the word "Aid".



LPPM UB  
Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA